

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan Pendekatan *Stakeholder* Dihubungkan dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara

Ainun Hayati, Ratna Januarita
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
ainunhayaa@gmail.com

Abstract—Good Corporate Governance or commonly referred to as GCG is a system of control and company regulation that is considered to reduce costs, increase stakeholder trust and improve best business practices. Based on the Regulation of the Minister of BUMN Number: Per-01/MBU/2011 concerning the Implementation of GCG Practices in BUMN. The application of GCG principles in Indonesia is mandatory for all state-owned enterprises including PT. INTI which is a BUMN. In order to maximize the implementation of GCG in BUMN, the Decree of the Minister of SOE SK-16/S.MBU/2012 on indicators/parameters of assessment and evaluation of the implementation of GCG in BUMN was issued. This needs to be considered so that in carrying out the company's activities and managing the company, it can achieve the company's goals optimally. The optimal implementation of GCG principles can prevent losses that may occur and affect stakeholders. This method of approach is normative juridical, which conducts a positive legal inventory of the application of GCG principles to SOE. This analysis is quantitative data analysis, namely data presented in the form of numbers and assessments. This data is a statistical dataset, namely data that is already available from the collection of an authorized third party. The purpose of this study is to determine the application of GCG principles associated with stakeholder approaches and to determine the application of GCG principles by directors linked to the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of GCG Implementation in SOE.

Keywords—Good Corporate Governance, State Owned Enterprises, Stakeholders.

Abstrak—Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) atau yang biasa disebut GCG merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan

yang dianggap dapat menurunkan biaya (cost), meningkatkan kepercayaan stakeholders dan meningkatkan praktik-praktik bisnis terbaik (best practices). Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN. Penerapan prinsip GCG di Indonesia diwajibkan bagi seluruh BUMN termasuk PT. INTI yang merupakan BUMN. Guna memaksimalkan implementasi GCG pada BUMN, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG pada BUMN. Hal ini perlu diperhatikan agar dalam melaksanakan kegiatan perseroan dan mengelola perseroan dapat mencapai tujuan perseroan secara maksimal. Penerapan prinsip GCG yang optimal dapat mencegah timbulnya kerugian yang mungkin akan terjadi dan berpengaruh terhadap stakeholders. Metode pendekatan ini adalah yuridis normatif, yang melakukan inventarisasi hukum positif tentang penerapan prinsip GCG pada BUMN. analisis ini adalah analisis data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka dan penilaian. Data ini adalah dataset statistik yaitu data yang sudah tersedia hasil pengumpulan pihak ketiga yang memiliki otoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip GCG dihubungkan dengan pendekatan stakeholders dan untuk mengetahui penerapan prinsip GCG oleh direksi dihubungkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan GCG pada BUMN.

Kata Kunci—Good Corporate Governance, Badan Usaha Milik Negara, Stakeholders.

I. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance atau biasa disebut GCG, merupakan sistem pengendalian dan pengaturan

perusahaan yang dianggap dapat menurunkan biaya (cost), meningkatkan kepercayaan stakeholder dan meningkatkan praktikpraktik bisnis terbaik (best practices). Oleh karena itu penerapan prinsip GCG di Indonesia diwajibkan bagi seluruh BUM. Hal tersebut didorong karena adanya komitmen pemerintah untuk menciptakan BUMN yang berkualitas global dan efisien dalam pengelolaannya. Banyaknya jumlah BUMN di Indonesia dengan hasil kinerja secara keseluruhan yang kurang menggembirakan dianggap hanya akan membebani anggaran negara (APBN). Namun, pada kenyataannya belum semua BUMN di Indonesia telah melaksanakan praktek GCG dengan sepenuhnya. Guna memaksimalkan implementasi GCG pada BUMN, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG pada BUMN, agar penerapan GCG pada BUMN dapat diukur dan dinilai.

Salah satu BUMN yang menerapkan prinsip GCG adalah PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT. INTI). Bagi PT. INTI, GCG telah menjadi strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha. Namun nyatanya PT. INTI masih belum menerapkan prinsip GCG dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut terbukti dengan tersiarnya kabar bahwa PT. INTI dilaporkan belum membayarkan gaji karyawan selama tujuh bulan terakhir atau lebih tepatnya sejak Februari 2020. Hal tersebut karena kerugian perseroan hingga akhirnya arus kas menjadi negatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dihubungkan dengan pendekatan stakeholders pada PT INTI? Dan Bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh direksi dihubungkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara pada PT INTI?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dihubungkan dengan pendekatan stakeholders
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh direksi dihubungkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara.

II. LANDASAN TEORI

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan kegiatan utamanya adalah untuk

mengelola cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam asal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG Pada BUMN, disebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam regulasi terdapat lima prinsip. Pertama, Prinsip Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kedua, Prinsip Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Ketiga, Prinsip Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Keempat, Prinsip Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Terakhir kelima, Prinsip Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Selain dari prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu merujuk pada prinsip lainnya yang bersifat umum dan merupakan landasan penting dari semua prinsip GCG, yaitu prinsip itikad baik (Good Faith). Charles Fried mengatakan bahwa ketika satu pihak membuat janji kepada pihak lain, maka pihak tersebut harus melaksanakan hal-hal yang telah dijanjikan; dan jika gagal memenuhi janjinya, maka dia harus menyerahkan sesuatu yang setara dengan hal yang dia janjikan.

Penerapan prinsip GCG sangat berpengaruh pada perusahaan, terutama kepada para stakeholders. Stakeholder adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik individu/ kelompok, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/perusahaan. Menurut terjemahan bahasa Indonesia, stakeholder adalah pemangku kepentingan/pihak yang berkepentingan. Keberadaan stakeholder diperlukan untuk membantu mengembangkan tujuan dari perusahaan tersebut. Namun tidak semua stakeholder memberi pengaruh positif terhadap perusahaan. Stakeholder pada perusahaan meliputi pemegang saham, karyawan, staff, pegawai, supplier, distributor maupun konsumen.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Dengan

Pendekatan Stakeholders Pada PT. INTI

Untuk mengetahui penerapan prinsip GCG di PT. INTI, maka perlu dilakukan penilaian (assessment) yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, penilaian tersebut berdasarkan pada enam aspek penerapan GCG, yaitu Komitmen terhadap penerapan GCG secara berkelanjutan, Pemegang saham dan RUPS/Pemilik Modal, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, Pengungkapan dan keterbukaan informasi, dan Faktor lainnya.

Oleh karena itu dalam melakukan analisis, penulis mengacu pada laporan hasil assessment penerapan good corporate governance pada PT. INTI (Perseero) tahun 2018, Nomor : LGCG-808/PW10/4/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2019 oleh BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat.

TABEL 1. DAFTAR CAPAIAN PENERAPAN GCG PADA PT. INTI

| No | Aspek Governance | Capaian Perusahaan | Persentase (%) | Penjelasan |
|-----------|---|--------------------|----------------|-------------|
| I | Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan | 6,101 | 87,16 | Sangat Baik |
| II | Pemegang Saham dan RUPS | 8,354 | 92,82 | Sangat Baik |
| III | Dewan Komisaris | 30,609 | 87,45 | Sangat Baik |
| IV | Direksi | 29,761 | 85,03 | Sangat Baik |
| V | Pengungkapan Informasi dan Transparansi | 6,659 | 73,99 | Cukup Baik |
| Sub Total | | 81,484 | | |
| VI | Aspek Lainnya | 0,000 | | |
| Total | | 81,484 | | Baik |

Sumber : laporan hasil assessment penerapan good corporate governance pada PT. INTI (Perseero) tahun 2018

Penerapan prinsip GCG pada PT. INTI jika dilihat dari tabel diatas, menunjukkan prinsip GCG telah diterapkan dengan baik pada PT. INTI. Pada aspek Komitmen terhadap penerapan GCG secara berkelanjutan, mendapat skor 6,101 = 87,16% dan termasuk kedalam kategori sangat baik. Pada aspek Pemegang saham dan RUPS/Pemilik Modal, mendapat skor 8,354 = 92,82% dan termasuk kedalam kategori sangat baik. Pada aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, mendapat skor 30,609 = 87,45% dan termasuk kedalam kategori sangat baik. Pada aspek Direksi, mendapat skor 29,761 = 85,03% dan termasuk kedalam kategori sangat baik. Pada aspek Pengungkapan dan keterbukaan informasi, mendapat skor 6,659 = 73,99% dan termasuk kedalam kategori cukup baik. Pada aspek Faktor lainnya. Penerapan prinsip GCG pada PT. INTI sama sekali tidak memenuhi syarat indikator penilaian terhadap aspek lainnya, sehingga aspek lainnya tidak berpengaruh terhadap penilaian penerapan prinsip GCG pada PT. INTI.

B. Analisis Penerapan Prinsip GCG Oleh Direksi Dihubungkan Dengan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan GCG Pada BUMN

Jika melihat pada laporan keuangan tahun 2019 yang merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Direksi PT INTI nampak banyak penurunan kondisi keuangan pada PT INTI yang signifikan dari tahun sebelumnya, hal tersebut menunjukkan kondisi keuangan PT. INTI saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, sebagai akibat dari keputusan Direksi, yang kurang menerapkan prinsip GCG dengan baik dan benar. Terbukti dengan adanya anjuran yang tercantum dalam rekomendasi Assesment GCG PT. INTI tahun 2018 terhadap Direksi, yaitu :

1. Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan, namun Anggaran Pelatihan Direksi belum dijabarkan dari Biaya Pengembangan SDM Karyawan dan setiap kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh anggota Direksi belum dibuatkan laporannya.
2. Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan, namun pengambilan keputusan program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah yang signifikan belum terdapat kajian kelayakan serta analisis risiko.
3. Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat Perseroan. Pembahasan kinerja dilakukan bulanan dengan Dewan Komisaris, namun analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja unit dibawah Direksi tidak terdokumentasikan.

Hal tersebut tentu saja sangat berdampak bagi para

stakeholders, salah satunya karyawan, yang diberitakan belum menerima gaji karyawan selama tujuh bulan terakhir atau lebih tepatnya sejak Februari 2020. Sebagai akibat dari kerugian yang diderita perseroan hingga arus kas menjadi negatif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip GCG pada PT. INTI mendapatkan predikat Baik. Hal tersebut dilihat dari hasil Assesment terhadap penerapan GCG pada PT. INTI tahun 2018 yang mendapatkan total skor mencapai 81,484. Jika skor yang dihasilkan >75 dan ≤ 85 , maka termasuk kedalam kategori yang mendapat predikat baik yang termasuk kedalam kategori predikat Baik. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG pada PT INTI termasuk kedalam kategori predikat Baik.
2. Laporan keuangan PT INTI tahun 2019 menunjukkan banyak penurunan kondisi keuangan pada PT INTI yang signifikan dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan kondisi keuangan PT. INTI saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, sebagai akibat dari keputusan yang dilakukan oleh Direksi, yang kurang menerapkan prinsip GCG dengan baik dan benar, sehingga berakibat pada stakeholders, terutama karyawan, yang diberitakan belum menerima gaji karyawan selama tujuh bulan terakhir, karena arus kas perseroan menjadi negatif.

V. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada PT INTI (Perseroan) diharapkan dapat meningkatkan penerapan prinsip GCG dalam melaksanakan kinerja perusahaan agar termasuk kedalam kategori yang lebih baik serta dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kepercayaan para stakeholders.
2. Kepada Direksi PT. INTI (Perseroan) diharapkan dapat meningkatkan penerapan prinsip GCG dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, agar tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ratna Januarita dan Yeti Sumiyati, Legal risk management: Can the COVID-19 pandemic be included as a force majeure clause in a contract?, *International Journal of Law and Management*, Vol. 63 No. 1, 2021.
- [2] Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- [3] Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG Pada, BUMN.

- [4] Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan GCG Pada BUMN.
- [5] 7 Bulan Tak Digaji, Begini Nasib Karyawan PT INTI Kini, <https://www.wartaekonomi.co.id/read303468/7-bulan-tak-digaji-begini-nasib-karyawan-pt-inti-kini>
- [6] Pengertian Stakeholder: Klasifikasi, Peran, dan Fungsi Stakeholder, <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-stakeholder.html>
- [7] Laporan Keuangan PT INTI (Persero) tahun 2019
- [8] Laporan Hasil Assesment Penerapan GCG pada PT. INTI (Persero) tahun 2018